

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Aidil Huda Pratama

NIM : 22 2012 379

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Aidil Huda Pratama

NIM : 22 2012 379

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aidil Huda Pratama

NIM : 22 2012 379

Progam Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, April 2017

Penulis,



Aidil Huda Pratama

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan
Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan**

Nama : Aidil Huda Pratama

NIM : 22 2012 379

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....
Pembimbing**



**Mizan, S.E., M.Si, Ak, CA
NIDN/NBM : 0206047101/859196**

Mengetahui,

Dekan

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirahjuddin, S.E., M.Si, Ak, CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806**

PRAKATA



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahillobbil alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt, yang telah memberikan rahmat serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku (**Suwarno dan Tumiati**) dan saudara-saudariku (**Muhammad dwika Juniar Rapiq dan Qisty azzahra**) yang hingga saat ini telah memberikan motivasi, do'a dan bantuan materialnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya **Bapak Mizan S.E.Ak.,M.Si.,CA** yang telah memberikan pengarahan dalam pembuatan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang mengizinkan dalam membantu menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin.,S.E,M.Si,Ak.CA selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mizan, S.E,Ak.,M.Si.,CA selaku Sektetaris Proqram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Ida Zuraidah.,S.E,M.Si selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan dan seluruh karyawan di Direktorat jenderal perimbangan keuangan Sumatera Selatan.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah SWT, amin ya robbal`alamin.

Wassalammu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, April 2017

Penulis,

Aidil Huda Pratama

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN DEPAN / COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN LAMPIRAN	xii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Sebelumnya	14
B. Landasan Teori	16
1. Laporan Keuangan Dan Tujuan Laporan Keuangan	16
2. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
3. Kinerja Keuangan Daerah	18
a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	18
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	19
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan	19
A. Pendapatan Asli Daerah	19
B. Dana Perimbangan	21
C. Belanja Modal	22
D. Belanja Rutin	23
E. Pertumbuhan Ekonomi	24
C. HIPOTESIS	
1. Pengujian Hipotesis Secara Bersamaan(Uji F)	24
A. Pengaruh Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	24
B. Pengaruh Expenditure Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	25
C. Pengaruh Taxes Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	26
D. Pengaruh Population Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	

Daerah	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Operasionalisasi Variabel	29
D. Data yang Diperlukan	30
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	31
1. Analisis Data	31
a. Analisis Kualitatif	31
b. Analisis Kuantitatif	32
2. Teknik Analisis	32
a. Uji Asumsi Klasik	33
b. Uji Regresi Linier Berganda	34
c. Uji Regresi Parsial(Uji T)	35
d. Pengujian Hipotesis	36
e. Uji Koefisien Determinasi	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. HASIL PENELITIAN	39
1. Data Umum	39
2. Data Khusus	47
a) Uji Asumsi Klasik	50
1) Uji Normalitas	50
2) Uji Multikolinearitas	51
3) Uji Heterokedastisitas	53
4) Uji Autokorelasi	54
B. Hasil Regresi Berganda	56
C. Analisis Korelasi	58
D. Uji Hipotesis	59
1) Uji F (Simultan)	59
2) Uji T (Parsial)	61
E) Koefisien Determinasi	62
B. PEMBAHASAN	63
1. Pengaruh <i>Revenue, Expenditure, Taxes, Dan Population</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Secara Bersama-Sama (Simultan)	63
2. Pengaruh <i>Revenue, Expenditure, Taxes, Dan Population</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Secara (Parsial)	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	69
A. Simpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 laporan keuangan dan jumlah penduduk kabupaten kota provinsi Sumatera selatan 2012-2014	9
Tabel II.1 penelitian sebelumnya	16
Tabel III.1 operasionalisasi variabel Peta sumatera selatan	29
Tabel IV.1 data realisasi APBD kabupaten/kota di provinsis sumatera selatan tahun 2012-2014.....	48
Tabel IV.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	51
Tabel IV.3 Uji Multikolinearitas	52
Tabel IV.4 Hasil Uji autokorelasi	55
Tabel IV.5 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	56
Tabel IV.6 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.....	58
Tabel IV.7 Koefisien Korelasi.....	59
Tabel IV.8 Uji Hipotesis Secara Simultan	60
Tabel IV.9 Uji hipotesis Parsial	61
Tabel IV.10 Koefisien Determinasi.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GambarIV.1 Peta Sumatera Selatan	43
GambarIV.2 Uji Heterokedastisitas.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

LAMPIRAN 2 : KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN 3 : JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

LAMPIRAN 4 : SERTIFIKAT MEMBACA DAN MENGHAFAL AL-QUR'AN

LAMPIRAN 5 : SURAT KETERANGAN TOEFL

LAMPIRAN 6 : SERTIFIKAT KKN

ABSTRAK

Aidil Huda Pratama / 22.2012.379 / Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah revenue, expenditure, taxes dan population berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Komparatif yaitu penulis akan melakukan perbandingan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pendapatan/revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. belanja/expenditure berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. pajak/tax tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penduduk/Population tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil uji hipotesis simultan menunjukkan variabel pendapatan, belanja, pajak daerah dan penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil uji R^2 , variabel pendapatan, belanja, pajak daerah dan penduduk memiliki pengaruh sebesar 65% terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan sisanya 35% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti budaya organisasi, pertumbuhan ekonomi daerah, ukuran legislatif, luas wilayah, dan sebagainya.

Kata Kunci : Kinerja keuangan, revenue, expenditure, taxes, population, rasio efisiensi, pemerintah daerah, Sumatera Selatan

ABSTRACT

Aidil Huda Pratama / 22.2012.379 / Factors Influencing Financial Performance of Local Government of Regency / City In South Sumatra

The purpose of this study is to analyze and determine whether the revenue, expenditure, taxes and the population effect on the financial performance of local government district / city in South Sumatra. Type of study used in this study is a comparative study that the author will do a comparison calculations on financial data obtained to solve existing problems in accordance with the purpose of research .. The data used in this research is secondary data. The results of this study is that the income / revenue and a significant negative effect on the Performance of Local Government Finance. shopping / expenditure and significant positive effect on the Performance of Local Government Finance. taxes / tax does not affect the performance of Local Government Finance. Population / Population does not affect the performance of Local Government Finance. Hypothesis test results simultaneously show variable revenues, expenditures, local taxes and population together have an effect on the financial performance of local governments. test results R², variable revenues, expenditures, local taxes and residents have the effect of 65% on the financial performance of local governments while the remaining 35% are influenced by other factors such as organizational culture, regional economic growth, the size of the legislative, area, and so forth.

Keywords : financial performance, revenue, expenditure, taxes, population, efficiency ratio, government area, South Sumatra

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni, ilmu (*science*) maupun perekayasaan (*technology*), namun juga dapat diartikan sebagai sebuah proses. Sesuai dengan ragam ukuran dan bentuk organisasi pengguna informasi akuntansi, maka bidang akuntansi dapat diklasifikasikan kedalam dua bidang utama yaitu: akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor privat adalah suatu proses akuntansi untuk mencatat aktivitas ekonomi perusahaan yang berorientasi laba (*profit oriented*) atau istilah lainnya adalah perusahaan swasta. Sedangkan akuntansi sektor publik adalah ditujukan bagi organisasi yang bersifat nirlaba, seperti yayasan, LSM dan pemerintah.

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara

demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengetahui mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan antar generasi, Evaluasi kinerja.

Komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, adalah dengan ditertibkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005, tentang standar akuntansi pemerintah (SAP). SAP yang pertama masih menggunakan basis kas modifikasi belum berbasis akrual, karena menjadi masa transisi dari *single entry* menuju *double entry*. Berdasarkan PP 24 tahun 2005 tersebut, pemerintah daerah masih diperkenankan untuk menggunakan

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilaian apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan mampu implementasi (mahsun, 2012: 145).

Abdul Halim (2014: L-4) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas terhadap PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kecerahan Belanja Daerah, dan Rasio Pertumbuhan. Dalam penelitian, untuk mengukur kinerja keuangan daerah penulis menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan harus lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi.

Memang kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas yaitu oleh Ratri Patriati (2010) yang melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan menguji pengaruh *revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, population, dan tourist* sebagai variabel independen, terhadap kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang diprosikan dengan *factor score* dari rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa variabel *revenue* dan *expenditure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Namun demikian *real estate, capital, taxes, grant, populations dan tourist* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Siti Nur Rochmah B (2010) yang melakukan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif,

dan leverage. Yang Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislatif, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Manik (2015) analisis faktor – faktor yang mempengaruhi anggaran belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di provinsi kepulauan riau. Yang melakukan penelitian secara parsial dan simultan faktor–faktor yang mempengaruhi pendapatan anggaran belanja daerah melalui belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan penelitian sebelumnya penulis bertujuan untuk meneliti tentang hubungan *revenue*, *expenditure*, *taxes* dan *population*. Sebab dipenelitian sebelumnya belum ada tentang hubungan *revenue*, *expenditure*, *taxes* dan *population* di pemerintah daerah sumatera selatan. Dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di sumatera selatan yang diwakilkan dengan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Revenue merupakan jumlah pendapatan asli daerah oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Pendapatan yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah yang mampu

baik dengan jumlah penduduk yang banyak, maka pemerintah harus bisa meningkatkan kinerja keuangannya.

Berikut ini disajikan data mengenai laporan realisasi keuangan daerah dan jumlah populasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2012 sampai tahun 2014:

Tabel I.1
Laporan keuangan dan jumlah penduduk
kabupaten kota provinsi sumatera selatan
2012-2014

No	Kab/Kota	Tahun	Revenue(X1)	Expanditure(X2)	Taxes(X3)	population(X4)
			dalam milyaran rupiah			dalam jutaan
1	prov. Sumsel	2012	5.224	4.561	1.804	7.078
		2013	5.468	5.679	1.883	7.829
		2014	6.252	5.513	2.268	7.941
2	Kab. Lahat	2012	1.188	1.129	20	380
		2013	1.230	1.426	25	385
		2014	1.534	1.388	58	389
3	Kab. Muba	2012	2.581	2.458	18	587
		2013	3.067	2.938	27	592
		2014	3.144	3.518	62	602
4	Kab. Mura	2012	1.333	1.214	14	543
		2013	1.514	1.455	18	543
		2014	1.142	1.219	46	379
5	Kab. Muara enim	2012	1.660	1.566	29	742
		2013	1.845	1.975	36	582
		2014	1.798	1.784	48	591
6	Kab. OKI	2012	1.274	1.290	14	753
		2013	1.410	1.400	23	765
		2014	1.577	1.460	80	776
7	Kab. OKU	2012	863	814	16	338
		2013	979	1.023	17	340
		2014	1.084	1.032	24	345
8	Kota Palembang	2012	2.241	2.113	333	1.503
		2013	2.511	2.637	357	1.536
		2014	2.929	2.812	464	1.558
9	Kota Lubuk Linggau	2012	681	633	13	209
		2013	754	815	18	213
		2014	919	897	18	216
10	Kab. Banyuasin	2012	1.393	1.267	26	774
		2013	1.664	1.669	31	788
		2014	1.833	1.915	52	800
11	Kab. Ogan Ilir	2012	907	832	16	393
		2013	995	1.058	6	398
		2014	1.071	991	11	404
12	Kab. OKU Timur	2012	940	913	11	629
		2013	1.173	1.186	12	635
		2014	1.213	1.161	18	642
13	Kab. Empat Lawang	2012	593	515	8	226
		2013	612	638	9	232
		2014	781	802	12	235

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Tahun 2017

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kabupaten/kota yang diambil dalam penelitian ini ada 13 objek penelitian yaitu 12 kabupaten/kota dan 1 provinsi. Data ini juga menunjukkan Realisasi pendapatan daerah terbesar selama tahun 2012 sampai 2014 di Provinsi Sumatera Selatan dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin yaitu tertinggi pada tahun 2014 sebesar Rp. 3,144 Milyar. Diikuti oleh Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang menggeser Kabupaten Muara Enim di posisi ketiga pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya pemekaran daerah baru atau kabupaten/kota baru di Provinsi Sumatera Selatan menyebabkan penurunan pendapatan kabupaten/kota sebelum dimekarkan seperti contoh Kabupaten Muara Enim yang dimekarkan menjadi Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir-PALI. Namun, fenomena lainnya menunjukkan daerah kabupaten/kota baru yang dapat meningkatkan atau mengembangkan sumber pendapatan daerahnya setelah terbentuk menjadi kabupaten/kota baru, dapat dicontohkan seperti Kabupaten Banyuasin yang dimekarkan dari Kabupaten Musi Banyuasin.

Data ini juga menunjukkan bahwa tingkat belanja daerah mengikuti tingkat pendapatan daerahnya. Apabila jumlah pendapatan daerahnya besar maka jumlah belanja daerahnya juga besar atau sebaliknya jumlah pendapatan daerahnya kecil maka jumlah belanja daerahnya juga mengikuti pendapatannya. Ketidakefisien kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola keuangan daerah juga masih sering terjadi. Dimana jumlah belanja daerah masih melebihi jumlah pendapatan daerahnya. Dari data di atas menunjukkan tahun 2014 ada 4 Kabupaten/kota yang tidak efisien dalam

mengelola keuangannya yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan pada tahun 2013 hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak efisien dalam mengelola keuangannya hanya 3 Kabupaten/kota yang efisien dalam keuangan daerahnya yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Komering Ilir – OKI. Sementara itu, pada tahun 2012 hampir seluruh Kabupaten/Kota efisien dalam mengelola keuangannya hanya Kabupaten Ogan Komering Ilir – OKI yang tidak efisien dalam mengelola keuangannya.

Selain itu, dari data di atas juga dapat dijelaskan adanya hubungan tingkat populasi penduduk dan jumlah pajak daerah yang diterima. Semakin tinggi tingkat populasi penduduk di suatu daerah maka akan semakin tinggi jumlah pajak daerah yang diterima. Atau sebaliknya jumlah populasi penduduk yang rendah maka semakin rendah jumlah pajak daerah yang diterima. hal ini juga berarti mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.**

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada dua, *pertama* yaitu empat faktor diantaranya *revenue*, *expenditure*, *taxes* dan

population dan *kedua* yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kota atau kabupaten yang ada di Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *revenue*, *expenditure*, *taxes* dan *population* berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan secara simultan dan parsial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah *revenue*, *expenditure*, *taxes* dan *population* berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan digunakan untuk menambah wawasan tentang laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran pemerintah daerah Sumatera Selatan di dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

3. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi serta menambah wawasan dan menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016. [Http://Djpk.Depkeu.Go.Id](http://Djpk.Depkeu.Go.Id)
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik ,Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-4.Salemba Empat. Jakarta
- Mahsun, Muhammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ke-4.BPFE.Yogyakarta
- Manik, Tumpal, 2015 *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau*
- Nordiawan, 2006 Dalam Christy Dan Adi, 2008.*Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar (BAS)*
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)*
- Ratri Patriati(2010) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah*
- Siti Nurochmah B (2015) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kelimabelas. Bandung. Alfabeta